

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan suatu negara. Berbagai negara akan melakukan upaya intensif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi optimal dan mengurangi angka kemiskinan. Di banyak negara di dunia, pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat terpenting untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan semakin banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi semakin nyata.

Kemiskinan merupakan permasalahan nasional yang sudah berlangsung lama di Indonesia yang belum ada solusinya. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2009 masih sangat tinggi, yaitu sekitar 32,5 juta jiwa atau sekitar 14,2 persen. Situasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan umumnya dipengaruhi oleh kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, tingginya angka buta huruf, kondisi yang buruk, dan kurangnya akses terhadap infrastruktur dan layanan publik yang memadai selain itu faktor dari kualitas pendidikan juga berpengaruh dalam kondisi kemiskinan suatu daerah

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 54,2 juta jiwa (sekitar 40% dari total penduduk) menjadi 22,5 juta jiwa (sekitar 11%) selama tahun 1976. Krisis ekonomi tahun 1997 memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang benar, sebagai akibat dari krisis yang sedang berlangsung, perekonomian Indonesia memburuk dalam dua tahun ke depan dengan pertumbuhan negatif. Tahun 1998 mencapai minus 13,13 persen dan tahun 1999 mencapai 1,29 persen. Dampak krisis ini kembali meningkatkan jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan masyarakat miskin dari kemiskinan akibat krisis melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat upaya pemberantasan. (PNPM) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, meningkatkan peluang dan daya tawar mereka, serta meningkatkan sistem bantuan dan keamanan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Hal ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Milenium, sebuah deklarasi yang diadopsi oleh 189 negara dan disepakati oleh 147 kepala pemerintahan dan negara bagian pada KTT Milenium di New York pada bulan September 2000. Deklarasi ini bertajuk “Tujuan Pembangunan Milenium”. (Tujuan Pembangunan Milenium – MDGs) terdiri dari delapan tujuan mengatasi kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu hamil, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan pembangunan global. Kedelapan tujuan tersebut diukur dengan menggunakan sasaran kualitatif dan kuantitatif, dengan periode perhitungan dimulai pada tahun 1990 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015 (BPS dan UNICEF, 2009).

Penanggulangan kemiskinan didasarkan pada konsep kemiskinan Badan Pusat Statistik Kemiskinan (BPS). BPD diukur dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Dibeberapa daerah atau kota-kota kecil di Indonesia kemiskinan menjadi salah satu masalah yang masih menjadi perhatian pemerintah. Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan, yang diukur dengan pengeluaran. “Miskin” mengacu pada penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan (BPS, 2020).

Konsekuensi dari konsep ini adalah bahwa pengentasan kemiskinan pada dasarnya bergantung pada upaya peningkatan pendapatan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Indonesia sendiri secara geografis mempunyai tingkat kemiskinan pedesaan yang paling tinggi dibandingkan kemiskinan perkotaan, sehingga selain kemanusiaan, sebenarnya penanganan kemiskinan juga diperkuat di wilayah sasaran pedesaan. Menurut Nugroho (2021) program pengentasan kemiskinan di Indonesia didasarkan pada temuan penelitian terbaru mengungkapkan bahwa program pengentasan kemiskinan di Indonesia telah berlangsung selama beberapa decade dan variasi program berbeda yang diprakarsai pemerintah masih terus berjalan. Program pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga dalam jangka pendek. Belakangan ini sudah banyak kemajuan yang dicapai pemerintah, antara lain bantuan tunai bersyarat untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pengobatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), dan bantuan sekolah untuk Program Indonesia Pintar (PIP). Yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Meskipun setiap program memiliki aspek unik, terdapat juga beberapa tantangan umum: Buruknya keselarasan dan kurangnya saling melengkapi antar program di berbagai tingkat pemerintahan.

Salah satu hambatan dalam pengentasan kemiskinan adalah pembaruan data mengenai masyarakat miskin yang terkadang lambat. Peningkatan jumlah penduduk miskin akibat pandemi yang terjadi beberapa tahun lalu perlu dimasukkan dalam data terkini, karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih mengalami kesalahan inklusi dan eksklusi serta masih memerlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pengendalian jumlah penduduk.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak ada kesepakatan antara DTKS dengan jaring pengaman sosial NIK penerima. Hal ini terkait dengan program jaring pengaman sosial yang akan dicanangkan. Keakuratan dan kesesuaian tujuan akan menentukan keberhasilan atau kegagalan program jaring

pengaman sosial yang terdesentralisasi. Inisiatif jaring pengaman sosial ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan keterampilan dan pendapatan mereka. Yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan pengembangan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini terutama ditujukan kepada UMKM yang paling terkena dampak pandemi virus corona. Mereka harus mengembangkan program yang mampu bertahan dalam situasi krisis. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi program pengentasan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pulau Jawa, sebagai pulau terbesar di Indonesia tentu memiliki peran besar dalam menentukan tingkat presentase kemiskinan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menduduki tingkat provinsi termiskin ke-2 di Pulau Jawa setelah Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus selanjutnya adalah masalah pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Menurut penelitian Nursini, (2019) pendapatan ini masih relatif bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan harus digunakan semaksimal mungkin untuk mengentaskan kemiskinan daerah menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah dan transfer antar pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Artinya, peningkatan pendapatan pemerintah dan transfer antar pemerintah di setiap daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang dapat digunakan untuk mendanai program pengentasan kemiskinan secara efektif. Oleh karena itu, dalam konteks ini, belanja pemerintah daerah justru terfokus pada program pendanaan OPD yang terkait langsung dengan pengentasan kemiskinan, sedangkan anggaran untuk OPD yang tidak terkait dengan pengentasan kemiskinan dibatasi. Selain pentingnya mengkaji secara detail program-program OPD yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan, sebaiknya program-program yang kurang efektif diganti (dihilangkan) dengan mengalihkan pendanaan ke program yang lebih efektif.

Kajian mengenai efektivitas program pengentasan kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Tohari (2019) mengadopsi sistem sasaran yang terintegrasi, dan

penelitian ini berfokus pada tiga program sosial terbesar di Indonesia yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemberian Beras kepada Masyarakat Miskin (Raskin), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dievaluasi secara bersamaan. Sistem penargetan terintegrasi jenis baru diterapkan untuk menyatukan kelayakan program, mengurangi kesalahan penargetan dan meningkatkan serta melengkapi program. Dengan kemungkinan 117% lebih tinggi untuk menerima ketiga program tersebut dibandingkan rumah tangga yang tidak memenuhi syarat. Analisis ini menjelaskan bahwa pengeluaran per kapita rumah tangga yang menerima ketiga program tambahan setidaknya 30 poin persentase lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tidak menerima sama sekali.

Pulau Jawa menjadi pulau dengan populasi penduduk terpadat yang ada di Indonesia. Pulau Jawa memiliki luas 128.297 km² dengan populasi sekitar 157,2 juta jiwa. Pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-2 termiskin di Pulau Jawa dengan presentase 10.77% dan tercatat sebanyak 3,9 juta orang naik dari 3,8 juta orang pada September 2022. Di Jawa Tengah, garis kemiskinan perkapita perbulan mencapai Rp 477.580 naik dari Rp 464.879 dari periode sebelumnya. Sementara garis kemiskinan per rumah tangga miskin di Jawa Tengah sebesar Rp 2.044.042, naik dari Rp 1.883.325 pada September 2022

Tabel 1.1 Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Kemiskinan								
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (persen)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kabupaten Kebumen	390 599,00	416 004,00	451 678,00	212,92	196,16	195,45	17,83	16,41	16,34
Kabupaten Brebes	445 853,00	472 326,00	513 339,00	314,95	290,66	286,14	17,43	16,05	15,78
Kabupaten Wonosobo	373 474,00	399 180,00	425 105,00	139,67	128,11	123,70	17,67	16,17	15,58
Kabupaten Pemasang	401 857,00	429 549,00	467 204,00	215,08	195,84	195,57	16,56	15,06	15,03
Kabupaten Purbalangga	384 183,00	407 849,00	439 208,00	153,08	145,33	143,41	16,24	15,30	14,99
Kabupaten Banjarnegara	328 679,00	351 333,00	380 046,00	150,19	141,25	138,99	16,23	15,20	14,90
Kabupaten Rembang	414 977,00	441 482,00	477 514,00	101,40	94,56	91,97	15,80	14,65	14,17
Kabupaten Sragen	363 349,00	389 265,00	426 482,00	122,91	115,14	114,62	13,83	12,94	12,87
Kabupaten Banyumas	417 086,00	441 520,00	479 027,00	232,91	220,47	216,50	13,66	12,84	12,53
Kabupaten Klaten	436 896,00	458 872,00	488 102,00	158,23	144,87	144,43	13,49	12,33	12,28
Kabupaten Demak	445 176,00	471 818,00	511 145,00	151,74	143,01	143,26	12,92	12,09	12,01
Kabupaten Grobogan	404 456,00	428 597,00	464 614,00	175,72	163,20	162,52	12,74	11,80	11,72
Kabupaten Blora	363 649,00	390 478,00	425 135,00	107,05	99,83	99,61	12,39	11,53	11,49
Kabupaten Purworejo	376 127,00	393 731,00	427 622,00	88,80	82,64	81,28	12,40	11,53	11,33
Kabupaten Cilacap	363 367,00	384 955,00	419 429,00	201,71	190,96	191,00	11,67	11,02	10,99
Kabupaten Magelang	353 608,00	377 497,00	411 129,00	154,91	145,33	144,49	11,91	11,09	10,96
Kabupaten Wonogiri	356 728,00	376 763,00	414 901,00	110,46	105,19	104,82	11,55	10,99	10,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Dari data kemiskinan Provinsi Jawa Tengah diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun berbagai upaya seperti bantuan sosial dan yang lainnya telah dilakukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, namun situasi kemiskinan masih tetap tinggi dan tertinggal dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa Tengah.

Hingga pada akhirnya pada 26 Juni 2023 Bupati Kebumen menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Kebijakan tersebut diatas belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan penurunan tingkat kemiskinan dikarenakan dapat dilihat dari data BPS, sebelum dan sesudah adanya kebijakan ini pergeseran persentase dari capaian tujuan kebijakan tersebut belum memperlihatkan hasil yang efektif. Hal ini dikarenakan pencapaian tujuan dari organisasi yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 1.2 Sebelum adanya kebijakan

Kemiskinan	Kemiskinan		
	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	342 437,00	362 847,00	380 557,00
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	208,70	201,30	211,09
Persentase Penduduk Miskin (persen)	17,47	16,82	17,59
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,48	2,58	2,62
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)	0,55	0,65	0,55
Kemiskinan Kabupaten Kebumen			
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional			

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Pada periode 2018 hingga 2020, tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dan sedikit penurunan meskipun tidak signifikan. Beberapa faktor mungkin mempengaruhi hal ini, seperti kondisi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan domestik yang tidak mampu menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten ini tentu menjadi sebuah

permasalahan yang perlu dicermati oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah perlu ada solusi yang konkrit dalam menghadapi permasalahan ini selain untuk menekankan tingkat kemiskinan, perlu ada upaya dari pemerintah untuk menekankan angka kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Kebumen untuk dapat menghindari pertumbuhan kemiskinan setiap tahunnya.

Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial dan peningkatan infrastruktur, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan masih terbatas. Program-program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterapkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. Namun, distribusi bantuan ini sering kali tidak merata dan tidak mencapai seluruh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, peluang ekonomi yang terbatas juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan tetap tinggi. Banyak masyarakat Kebumen yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak pasti. Kurangnya pelatihan dan kesempatan kerja yang layak membuat mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Tabel 1.3 Persentase kemiskinan setelah ada kebijakan

Kemiskinan	Kemiskinan		
	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	380.557,00	390.599,00	416.004,00
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	211,09	212,90	196,16
Persentase Penduduk Miskin (persen)	17,59	17,83	16,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,62	3,24	3,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)	0,55	0,88	1,02

Keterangan Data :
Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Memasuki tahun 2021, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan lebih efektif. Namun,

data menunjukkan bahwa persentase kemiskinan dari tahun 2021 hingga 2023 tetap menunjukkan tren yang sama, yaitu tidak ada penurunan yang signifikan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa meskipun persentase penduduk miskin tertera menurun setiap tahunnya namun penurunan tidak terjadi secara signifikan. Bahkan apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin tiap tahunnya naik turun. Pencatatan TKPK Kabupaten Kebumen 4 Januari 2023 Page 2 Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan sebesar 0,99% dari semula 4,42% pada Tahun 2021 menjadi sebesar 5,51% pada Tahun 2022 yang menjadi tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan sebelum peraturan ini diterbitkan pun angka kemiskinan Kabupaten Kebumen hanya bergerak 0.5 hingga 1%.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang telah lama menjadi tantangan serius di wilayah ini. Peraturan ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program dan inisiatif yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak diberlakukan, Peraturan Daerah ini telah memasukkan berbagai program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Harapannya, dengan adanya regulasi yang jelas dan terarah, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen akan mengalami penurunan yang signifikan.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa dampak dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2023 ini belum mencapai hasil yang diharapkan. Data menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan ini, tidak ada perubahan yang signifikan dalam persentase penurunan angka kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun peraturan telah diterapkan, hasil yang diharapkan masih jauh dari realisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul Efektivitas Kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, temuan masalah yang ada adalah:

- a. Kebumen merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan kesatu di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Persentase kemiskinan di Kabupaten Kebumen setelah dan sebelum adanya kebijakan tidak menunjukkan dampak yang signifikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pencapaian tujuan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kebumen?
- b. Bagaimana integrasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kebumen?
- c. Bagaimana adaptasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kebumen?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian tujuan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis integrasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis adaptasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti sangat mengharapkan dengan adanya penelitian ini semoga menjadi manfaat oleh peneliti sendiri atau oleh para pembaca baik itu manfaat teoritis maupun praktis. Berikut ini peneliti dapat menguraikan untuk memperoleh manfaat yang diharapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Keunggulan teoritis penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi publik. Kajian ini juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian komparatif untuk penelitian selanjutnya, memberikan kontribusi terhadap penyelesaian dan penyelesaian studi yang memperluas pengetahuan akademik. Peneliti dalam melakukan penelitian ini berharap dapat membantu bagi pembaca maupun penulis dalam memperluas kajiannya terkait Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang membentuk kajian yang menambah pengetahuan peneliti secara komprehensif dan membantu dalam penyusunan penelitian tahap selanjutnya sesuai dengan topik yang diangkat.

b. Bagi Universitas

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat memberikan hasil berupa kajian referensi untuk pengembangan dan pembelajaran ilmu administrasi publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Bagi Instansi

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan hasil yang diharapkan, sehingga hal ini dapat memberikan saran dan masukan, serta manfaat dalam mengevaluasi dan meningkatkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

d. Bagi Publik

Hasil penelitian ini diharapkan oleh peneliti untuk memberikan sumber informasi yang jelas kepada masyarakat Kabupaten Kebumen mengenai Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam rangkaian penelitian ini peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Efektivitas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen”. Kemudian dalam membantu penelitian ini teori yang digunakan peneliti dalam mengkaji ini adalah teori Efektivitas Duncan dalam *Steers* (2020:15) terdapat tiga hal yang dapat menjadi ukuran efektivitas suatu organisasi yang wajib dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah wujud keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka upaya mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan tujuan yang ditetapkan sebagai tujuan dan dasar hukum yang berlaku.

b. Integrasi

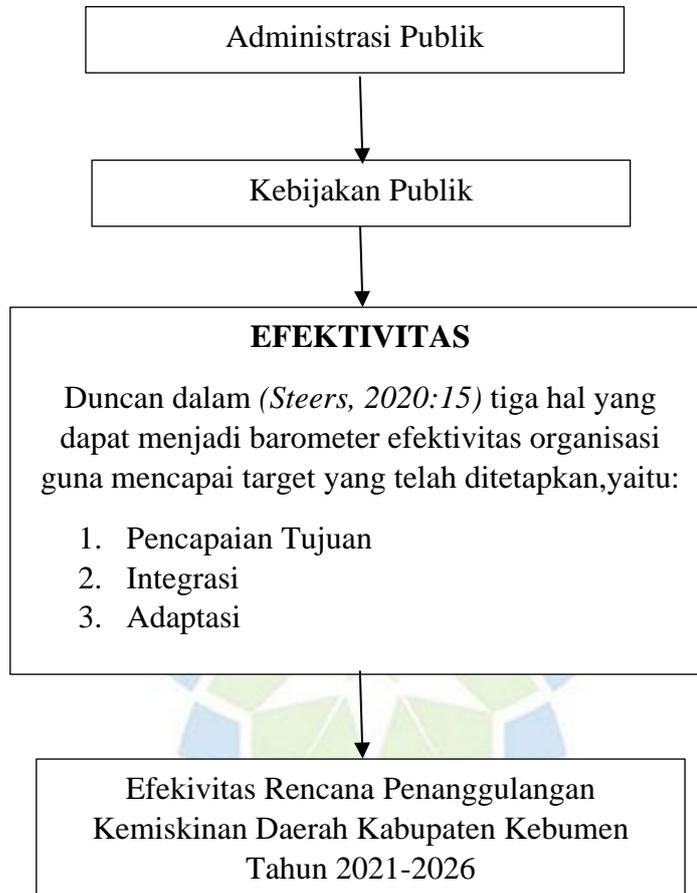
Sejauh mana suatu organisasi mengukur melalui kolaborasi dengan organisasi lain untuk meningkatkan komunikasi, hubungan masyarakat, dan membangun konsensus yang ada. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat setempat.

c. Adaptasi

Suatu bentuk adaptasi yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau kebijakan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kemajuan adaptasi lingkungan adalah tingginya kinerja pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini berdampak besar pada angkutan umum yang memiliki pelayanan dan infrastruktur yang baik, namun kurang antusias dari masyarakat yang menggunakannya.

Penerapan ketiga dimensi teori ini dianggap sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, karena dapat memberikan ukuran terhadap waktu, evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan, dan mempertimbangkan aspek hukum yang relevan.

Tabel 1.4 Kerangka Pemikiran Penelitian



G. Proposisi

Efektivitas penanggulangan kemiskinan di Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah dapat optimal jika dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.